

ABSTRAK

Skripsi dengan Judul judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Terhadap Praktik Perizinan Pemasangan Tiang *Fiber Optic* dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)” ini ditulis oleh Aprilia Wahidatul Faizah, NIM. 126103211017, dengan pembimbing Fahmi Arif, S.H, M.H.

Kata Kunci: Implementasi, Perizinan, Tiang *Fiber Optic*, Fiqih Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya aduan warga mengenai pemasangan tiang *Fiber Optic* ilegal di Kabupaten Tulungagung yang sangat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan serta merusak estetika kota. Hal ini ditandai dengan banyak tiang *Fiber Optic* yang terpasang disembarang tempat dengan kabelnya yang semrawut dan kendor karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biasanya para provider memasang tiang tersebut di malam hari dan diletakkan didekat tiang *Fiber Optic* yang sudah mengajukan perizinan supaya dinas terkait kesulitan untuk mengidentifikasi.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko terhadap praktik perizinan pemasangan tiang *Fiber Optic* di kabupaten Tulungagung? (2) Bagaimana praktik perizinan pemasangan tiang *Fiber Optic* di kabupaten Tulungagung? (3) Bagaimana praktik perizinan pemasangan tiang *Fiber Optic* di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqih siyasah? Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko terhadap praktik perizinan pemasangan tiang *Fiber Optic* di kabupaten Tulungagung. (2) untuk mendeskripsikan praktik perizinan pemasangan tiang *Fiber Optic* di kabupaten Tulungagung (3) untuk mendeskripsikan praktik perizinan pemasangan tiang *Fiber Optic* di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqih siyasah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian empiris yang berfokus pada pengamatan terhadap fenomena hukum dan konteks sosial yang nyata. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung. Sumber data berasal dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, verifikasi dan melakukan pengecekan keabsahan temuan.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko terhadap pemasangan tiang *Fiber Optic* ditandai dengan ditetapkannya OSS RBA sebagai media untuk mengajukan perizinan berusaha di kabupaten Tulungagung. Namun, adanya regulasi ini belum berjalan dengan

efektif karena beberapa hambatan (2) untuk sementara waktu perizinan *Fiber Optic* di Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan menyetorkan titik-titik koordinat dimana tiang *Fiber Optic* tersebut akan/sudah dipasang yang nantinya akan dilakukan dua kali survei oleh Dinas PUPR dan Dinas Kominfo untuk memastikan letak tiang dan struktur tiang *Fiber Optic* yang dipasang sesuai dengan ketentuan tanpa membahayakan pengguna jalan dan merusak estetika kota.. Untuk provider yang harus mengajukan perizinan ialah provider yang memasang tiang *Fiber Optic* di ruang publik seperti ruas milik jalan Kabupaten. Untuk upaya penegakan hukum terhadap pemasangan tiang *Fiber Optic* ilegal di Kabupaten Tulungagung dilakukan oleh Dinas PUPR, Dinas Kominfo dan Satpol PP Kabupaten Tulungagung dengan mengidentifikasi pemilik tiang *Fiber Optic*. Upaya penegakan hukum terhadap pemasangan tiang *Fiber Optic* hanya dilakukan ketika terdapat aduan dari masyarakat dan pada saat Dinas PUPR terdapat pekerjaan di ruas-ruas yang memungkinkan tiang-tiang *Fiber Optic* yang tertanama di ruas tersebut harus dipindah. Jadi, untuk di Kabupaten Tulungagung belum ada razia dan pendataan secara rutin terkait pemasangan tiang *Fiber Optic*.

(3) Tinjauan Siyasah Idariyah mengenai perizinan ambulans, dalam AlQur'an maupun hadits belum diatur mengenai perizinan. Perizinan sendiri perlu dibentuk untuk memberikan kebaikan atau kemaslahatan bagi masyarakat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kemudharatan. Dalam surat An-Nisa' ayat 58 dalam surat tersebut mempunyai arti "apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil" memiliki makna bahwa pemerintah seharusnya memberikan keadilan berupa peraturan daerah yang jelas terkait *Fiber Optic* agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Perlu adanya aturan mengenai perizinan ambulans agar terciptanya tertib administrasi sehingga memberikan kelayakan atau pengawasan dalam perizinan *Fiber Optic* yang pada akhirnya memberikan rasa keamanan bagi masyarakat atau pemerintah.

ABSTRACT

The thesis entitled “Implementation of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Licensing on the Practice of Licensing for the Installation of Fiber Optic Poles in the Perspective of Fiqh Siyasah (Case Study in Tulungagung Regency)” was written by Aprilia Wahidatul Faizah, NIM. 126103211017, with the supervisor Fahmi Arif, S.H, M.H.

Keywords: Implementation, Licensing, Fiber Optic Poles, Fiqh Siyasah

This research was motivated by the many complaints from residents regarding the installation of illegal Fiber Optic poles in Tulungagung Regency which are very disturbing and dangerous for road users and damage the aesthetics of the city. This is indicated by the many Fiber Optic poles installed in random places with messy and loose cables because they do not comply with applicable regulations. Usually, providers install these poles at night and place them near Fiber Optic poles that have applied for permits so that the relevant agencies have difficulty identifying them.

The problem formulation in this study is (1) How is the implementation of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Licensing towards the practice of licensing the installation of Fiber Optic poles in Tulungagung Regency? (2) How is the practice of licensing the installation of Fiber Optic poles in Tulungagung Regency? (3) How is the practice of licensing the installation of Fiber Optic poles in Tulungagung Regency from the perspective of fiqh siyasah? The objectives of this study are (1) to describe the implementation of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Licensing towards the practice of licensing the installation of Fiber Optic poles in Tulungagung Regency. (2) to describe the practice of licensing the installation of Fiber Optic poles in Tulungagung Regency (3) to describe the practice of licensing the installation of Fiber Optic poles in Tulungagung Regency from the perspective of fiqh siyasah.

The research method used in this study is a qualitative method, employing empirical research that focuses on observations of real legal phenomena and social contexts. The research locations are the Public Works and Spatial Planning Agency, the Communication and Informatics Agency, and the Investment and One-Stop Integrated Services Agency of Tulungagung Regency. Data sources come from primary, secondary, and tertiary data. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, drawing conclusions, verification, and checking the validity of the findings.

The results of this study indicate that: (1) The implementation of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing for the installation of Fiber Optic poles is marked by the establishment of OSS RBA as a medium for applying for business permits in Tulungagung Regency. However, this regulation has not been implemented effectively due to several obstacles such as

(2) For the time being, Fiber Optic permits in Tulungagung Regency are carried out by submitting the coordinate points where the Fiber Optic poles will/have been installed, which will then be surveyed twice by the PUPR Service and the Kominfo Service to ensure the location of the poles and the structure of the Fiber Optic poles installed are in accordance with the provisions without endangering road users and damaging the aesthetics of the city. For providers who must apply for permits are providers who install Fiber Optic poles in public spaces such as roads belonging to the Regency. For law enforcement efforts against the installation of illegal Fiber Optic poles in Tulungagung Regency, the PUPR Service, the Kominfo Service and the Tulungagung Regency Satpol PP are carried out by identifying the owners of the Fiber Optic poles. Law enforcement efforts against the installation of Fiber Optic poles are only carried out when there are complaints from the public and when the PUPR Service has work on the sections that allow the Fiber Optic poles installed on the section to be moved. So, in Tulungagung Regency there have been no raids and routine data collection regarding the installation of Fiber Optic poles. (3) Review of Siyasah Idariyah regarding ambulance licensing, in the Qur'an and hadith there are no regulations regarding licensing. Licensing itself needs to be established to provide goodness or benefits for the community to avoid undesirable things such as harm. In the letter An-Nisa' verse 58 in the letter it has the meaning "when establishing laws between people so that you establish with justice" has the meaning that the government should provide justice in the form of clear regional regulations regarding Fiber Optic so that it can be implemented by the community. There needs to be regulations regarding ambulance licensing in order to create orderly administration so that it provides eligibility or supervision in Fiber Optic licensing which ultimately provides a sense of security for the community or government.

محلض

أطروحة بعنوان "تنفيذ اللائحة الحكومية رقم ٥ لعام ٢٠٢١ بشأن تنفيذ الترخيص القائم على المخاطر لممارسات الترخيص لتركيبة أعمدة الألياف الضوئية من منظور الفقه السياسي (دراسة حالة في منطقة تولونج أجونج)" كتبها أبريليا وحيداتول فايزة، المعهد الوطني للإدارة ١٧٠١٠٣٢١١٠١٢٦١٠، مع المشرف فهمي عارف، س.ح، ٢٠٢١.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، الترخيص، أعمدة الألياف الضوئية، فقه السياسة

تم إجراء هذا البحث بسبب الشكاوى العديدة من السكان فيما يتعلق بتركيب أعمدة الألياف الضوئية غير القانونية في منطقة تولونج أجونج والتي تسبب الإزعاج الشديد والخطورة على مستخدمي الطرق وتضرر بجماليات المدينة. يتضح ذلك من خلال تركيب العديد من أعمدة الألياف الضوئية في أماكن عشوائية مع كابلات فوضوية وفضفاضة لأنها لا تتوافق مع اللوائح المعمول بها. عادة ما يقوم المزودون بتثبيت هذه الأعمدة ليلاً ووضعها بالقرب من أعمدة الألياف الضوئية التي تقدمت بطلب للحصول على تصاريح بحيث يكون من الصعب على الهيئات المعنية تحديدها.

صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي (١) كيف يتم تنفيذ اللائحة الحكومية رقم ٥ لعام ٢٠٢١ بشأن تنفيذ الترخيص القائم على المخاطر تجاه ممارسة ترخيص تركيب أعمدة الألياف الضوئية في مقاطعة تولونج أجونج؟ (٢) كيف يتم ممارسة ترخيص تركيب أعمدة الألياف الضوئية في مقاطعة تولونج أجونج؟ (٣) كيف يتم ممارسة ترخيص تركيب أعمدة الألياف الضوئية في مقاطعة تولونج أجونج من منظور الفقه السياسي؟ أهداف هذه الدراسة هي (١) وصف تنفيذ اللائحة الحكومية رقم ٥ لعام ٢٠٢١ بشأن تنفيذ الترخيص القائم على المخاطر تجاه ممارسة ترخيص تركيب أعمدة الألياف الضوئية في مقاطعة تولونج أجونج. (٢) وصف ممارسة ترخيص تركيب أعمدة الألياف البصرية في مقاطعة تولونج أجونج (٣) وصف ممارسة ترخيص تركيب أعمدة الألياف البصرية في مقاطعة تولونج أجونج من منظور الفقه السياسي.

المنهج البحثي المستخدم في هذه الدراسة هو المنهج النوعي، حيث يستخدم نوع من البحوث التجريبية التي تركز على ملاحظة الظواهر القانونية الواقعية والسياقات الاجتماعية. يقع موقع هذا البحث في دائرة الأشغال العامة والتخطيط المكاني، ودائرة الاتصالات والمعلومات، ودائرة الاستثمار والخدمات المتكاملة الشاملة في منطقة تولونج أجونج. تأتي مصادر البيانات من البيانات الأولية والثانوية والثالثية. تتضمن تقنيات جمع البيانات الملاحظة والمقابلات والتوثيق. لتقنيات تحليل البيانات مع اختزال البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج والتحقق والتأكد من صحة النتائج.

شير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (١) إن تطبيق اللائحة الحكومية رقم ٥ لعام ٢٠٢١ بشأن تطبيق تراخيص الأعمال القائمة على المخاطر لتركيب أعمدة الألياف الضوئية، قد اتسم بإنشاء كوسيلة لتقديم طلبات الحصول على تصاريح الأعمال في منطقة تولونجاجونج. ومع ذلك، لم يُطبق هذا النظام بفعالية بسبب عدة عقبات. (٢) في الوقت الحالي، تُصدر تصاريح الألياف الضوئية في مقاطعة تولونغاغونغ عن طريق تقديم إحدائيات نقاط تركيب أعمدة الألياف الضوئية، والتي ستقوم دائرة ودائرة الاتصالات والمعلومات بمسحها مرتين للتأكد من توافق موقع الأعمدة وهيكلها مع الأحكام دون تعريض مستخدمي الطرق للخطر أو الإضرار بمظهر المدينة. يجب على مقدمي الخدمات التقدم بطلب للحصول على التصاريح، وهم مقدمو الخدمات الذين يقومون بتركيب أعمدة الألياف الضوئية في الأماكن العامة، مثل الطرق التابعة للمقاطعة. أما بالنسبة لجهود إنفاذ القانون ضد تركيب أعمدة الألياف الضوئية غير القانونية في مقاطعة تولونغاغونغ، فتقوم دائرة ودائرة الاتصالات والمعلومات ودائرة ساتبول في مقاطعة تولونغاغونغ بتحديد هوية مالكي أعمدة الألياف الضوئية. ولا تُنفذ جهود إنفاذ القانون ضد تركيب أعمدة الألياف الضوئية إلا في حالة وجود شكاوى من الجمهور، وعندما تقوم دائرة بأعمال في الأجزاء التي تسمح بنقل أعمدة الألياف الضوئية المثبتة فيها. لذا، لم تكن هناك أي مداخلات أو جمع روتيني للبيانات في منطقة تولونجاجونج فيما يتعلق بتثبيت أعمدة الألياف الضوئية. (٣) مراجعة السياسة الإدارية المتعلقة بترخيص سيارات الإسعاف، لا توجد في القرآن والسنة أي لوائح خاصة بالترخيص. يجب أن يكون الترخيص بحذ ذاته سندًا لتحقيق الخير أو النفع للمجتمع وتجنب المفاسد كالأضرار. في سورة النساء، الآية ٥٨، ورد معنى "وإذا أقاموا بين الناس أحكامًا تحكمهم بالعدل"، أي أن على الحكومة أن تحقق العدل من خلال لوائح إقليمية واضحة بشأن الألياف الضوئية، بحيث يمكن للمجتمع تطبيقها. يجب وضع لوائح خاصة بترخيص سيارات الإسعاف لضمان إدارة منظمة تضمن الأهلية والإشراف على ترخيص الألياف الضوئية، مما يوفر في نهاية المطاف شعورًا بالأمن للمجتمع أو الحكومة.